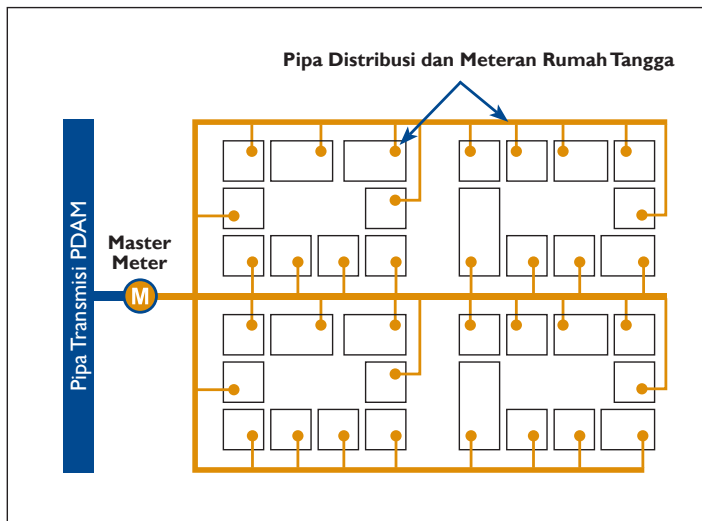


Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sekaligus Meningkatkan Kinerja PDAM



Ilustrasi sistem "Master Meter".

Di daerah perkotaan di Indonesia, rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan air perpipaan. Seringkali, PDAM tidak memiliki cukup pasokan air baku untuk melayani pelanggan baru. Namun pada beberapa kasus, terdapat berbagai hambatan lain yang tidak memungkinkan mereka untuk menikmati layanan air perpipaan. Mungkin karena berlokasi di pemukiman liar tanpa hak kepemilikan dimana PDAM tidak diizinkan membangun infrastruktur secara resmi; mungkin juga tempat tinggal mereka terdapat di daerah yang kurang terencana dan pada penduduk sehingga sistem distribusi air sangat sulit untuk dikembangkan dan dipelihara; atau mungkin saja karena mereka memang tidak mampu untuk membayar biaya pemasangan sambungan (seharga sekitar USD 150 atau IDR 2 juta).

Sebagai gantinya, rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan air bersih mereka dari berbagai macam sumber. Mulai dari keran umum yang biasanya sulit untuk diakses atau berada di bawah kendali "mafia" air setempat; penjual air keliling yang menjualnya per jerigen berisikan 20 liter air; sumur dangkal yang biasanya sudah terpolusi dan payau; serta toko penjual air setempat yang menjual air minum "olahan" dengan harga yang cukup mahal. Pada akhirnya, rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah justru membayar 20 sampai 30 kali lebih mahal

dibandingkan yang mendapatkan akses layanan air perpipaan. Tentunya lebih mahal dan kualitas air yang mereka dapatkan pun patut dipertanyakan.

Selain penderitaan bagi rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah, situasi diatas juga berdampak pada peningkatan jumlah Air Tidak Berekening atau Non-Revenue Water (NRW). Dalam kata lain, tanpa akses resmi ke air perpipaan, beberapa penghuni atau penjual akan mencari cara untuk memanfaatkan air perpipaan secara "ilegal". Hal ini tidak hanya dapat merugikan PDAM karena tidak mendapatkan keuntungan dari sambungan-sambungan tersebut, namun sambungan ilegal biasanya tidak terpasang secara benar, tidak terpelihara dan tidak sesuai standar sehingga mengakibatkan kebocoran pada perpipaan sehingga mengakibatkan lebih banyak kerugian bagi PDAM.

Sebagai salah satu tanggapan atas situasi tersebut diatas, USAID telah mempromosikan pembentukan sistem pasokan air komunal "Master Meter" di Indonesia yang mampu melayani 80 hingga 100 rumah tangga sekaligus. Sistem ini mengalirkan air dari sambungan pipa utama milik PDAM yang berdekatan dengan pemukiman warga dan sistem distribusinya dikembangkan sendiri oleh warga dengan memasang master meter pada setiap rumah.



Sebuah Master Meter yang baru terpasang di Desa Ketapang, Kota Sibolga, Sumatera Utara.



Pelatihan Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan diberikan kepada anggota KSM di Surakarta, Jawa Tengah.



Pengguna Master Meter di Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk untuk:

- Pemeliharaan sistem Master Meter
- Mengawasi tingkat pemakaian air tiap rumah tangga
- Menagih biaya berdasarkan jumlah pemakaian masing-masing rumah tangga, dan
- Membayarkan tagihan air bulanan.

Biaya rata-rata sebuah sistem Master Meter yang dapat melayani 100 rumah tangga (500 orang) adalah sekitar USD 50.000 (termasuk sambungan ke pipa dan meteran PDAM, sistem distribusi dan meteran internal). Setiap rumah tangga dapat berkontribusi dalam membayar sebagian dari jumlah tersebut dan sebagai hasil dari bergabung dalam sistem Master Meter, tagihan air bagi keluarga berpenghasilan rendah dapat ditekan dari USD 30 per bulan menjadi hanya beberapa dolar saja. Hal ini tentunya merupakan penghematan yang besar, ditambah lagi tingkat kesehatan pun lebih baik dan menghemat waktu dalam memperoleh air bersih.

Dengan sistem Master Meter ini, PDAM pun juga dapat meraup untung. Tingkat NRW menurun (sambungan ilegal dan kebocoran pipa berkurang); penagihan pun menjadi lebih mudah karena hanya berurusan dengan satu pelanggan saja; dan biaya pemeliharaan yang lebih murah karena distribusi air dikelola oleh KSM. Lebih

penting lagi, PDAM tidak perlu khawatir bertentangan dengan hukum karena rumah tangga “tidak resmi” tersebut bukan pelanggan langsung dan dengan demikian dapat memberikan pelayanan air bersih yang lebih menyeluruh.

Walaupun sistem Master Meter merupakan pendekatan yang baik dalam menyediakan pelayanan air bersih di beberapa daerah, patut diingat bahwa PDAM harus memiliki pasokan air baku yang cukup dan sistem pengilangan yang memadai jika ingin menambah lebih banyak pelanggan. Masalah ini seringkali ditemui di beberapa PDAM. Program Master Meter juga memerlukan dukungan aktif dari PDAM dan Pemerintah Daerah setempat, serta hubungan dan peningkatan kapasitas tingkat masyarakat yang kuat.

USAID/Indonesia (?) turut berkontribusi dalam pengembangan program Master Meter di bawah proyek Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH) yang dibiayai oleh USAID dengan pengalaman yang didapat dari USAID Environmental Services Project (ESP) sebelumnya. Melalui proyek-proyek tersebut, USAID telah memfasilitasi pengembangan sistem Master Meter di DKI Jakarta, Medan, Tangerang, Surakarta, Sidoarjo, Surabaya dan Jayapura.

Risalah Teknis MASTER METERS

IUWASH adalah program lima tahun yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan dilaksanakan di bawah kepemimpinan Development Alternatives, Inc. (DAI).

Untuk informasi lebih lanjut:
Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH)
Mayapada Tower 10th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia
Tel. +62-21 522 - 0540 Fax. +62-21 522 - 0539

www.iuwash.or.id
www.facebook.com/iuwash
[twitter @airsanitasi](https://twitter.com/airsanitasi)